

# ANEKSASI RUSIA DI KRIMEA DAN KONSEKUENSI BAGI UKRAINA

## *THE RUSSIA'S ANNEXATION OF CRIMEA AND ITS CONSEQUENCES FOR UKRAINE*

**Indriana Kartini**

Peneliti Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta

*E-mail:* indriana.kartini@gmail.com

Diterima: 6 Agustus 2014; direvisi: 2 September 2014; disetujui: 10 Desember 2014

### **Abstract**

*The annexation of Crimea by the Russian Federation was launched after the downfall of Ukraine President Viktor Yanukovich who has been alleged by the opposition as pro-Russian. The referendum which has been conducted by Crimean people in post-annexation has reinforced the Crimean demand for independence from Ukraine and its choice to unify with Russia. Although the referendum has been viewed as illegal by Ukraine authority, in fact, Crimea is now under Russia's authority. This article focuses on the Russia's annexation of Crimea by analysing Russia's strategic interests as a driving force for the annexation; analysing the position of Ukraine, Russia, and Crimea after the demise of the USSR; and the consequences of the loss of Crimea for Ukraine that has changed the constellation of domestic politics, society, and economics, and also the land border between Ukraine-Crimea-Russia.*

**Keywords :** *annexation, Russia, Crimea, Ukraine.*

### **Abstrak**

Aneksasi wilayah Krimea oleh Rusia terjadi menyusul jatuhnya Presiden Ukraina Viktor Yanukovich yang dianggap pro Rusia oleh kelompok oposisi. Referendum yang dilakukan rakyat Krimea pasca aneksasi menegaskan kembali tuntutan kemerdekaan Krimea dari Ukraina dan pilihan untuk bergabung dengan Rusia. Meski referendum tersebut dianggap tidak sah oleh Kiev, secara *de facto* Krimea kini berada di bawah penguasaan Kremlin. Tulisan ini memfokuskan pada aksi aneksasi Rusia di Krimea dengan menganalisis kepentingan strategis Rusia di wilayah Krimea yang mendorong aksi aneksasi; termasuk menganalisis posisi Ukraina, Krimea, dan Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet; serta konsekuensi lepasnya Krimea dari Ukraina yang merubah konstelasi politik domestik, sosial, dan ekonomi, serta batas wilayah Ukraina-Krimea-Rusia.

**Kata Kunci :** aneksasi, Rusia, Krimea, Ukraina.

### **Pendahuluan**

Aksi aneksasi yang dilakukan Rusia di semenanjung Krimea – wilayah Ukraina yang terdiri dari Republik Otonom Krimea dan kota Sevastopol – pada Februari 2014, mengejutkan komunitas internasional. Krisis internasional ini melibatkan Rusia dan Ukraina, dimana Ukraina kehilangan kontrol atas wilayah tersebut. Akibat aneksasi itu, secara *de facto* semenanjung Krimea berada di bawah penguasaan pemerintah Federasi Rusia meski belum diakui oleh PBB.

Krisis di Krimea terjadi setelah adanya gerakan Euromaidan atau “Eurosquare”, yakni gelombang demonstrasi di Ukraina pada 21 November 2013 yang menginginkan Ukraina melakukan integrasi dengan Eropa. Aksi protes tersebut meluas menjadi seruan untuk memberhentikan Presiden Viktor Yanukovich dan pemerintahannya yang pro Rusia. Aksi protes juga memfokuskan pada isu ideologi dan geopolitik yang membagi negara ke dalam dua bagian, yakni “Eropa vs Rusia” atau “*forward*

to the West vs. back to the USSR".<sup>1</sup> Aksi protes mencapai puncaknya pada pertengahan Februari 2014 ketika aparat kepolisian merespon aksi protes pro Uni Eropa dengan cara konfrontatif yang justru membuat gelombang protes semakin besar. Sebagai konsekuensinya, pada 21 Februari 2014 Presiden Viktor Yanukovych meninggalkan ibukota negara, Kiev.

Parlemen Ukraina kemudian memberhentikan Yanukovych dan menunjuk presiden sementara, Arseniy Yatsenyuk dan membentuk pemerintahan sementara. Pemerintahan baru itu mendapat pengakuan dari PBB dan Uni Eropa. Namun, Rusia memandang pemerintahan Yatsenyuk sebagai ilegal dan merupakan bentuk kudeta. Rusia bahkan menuduh Amerika Serikat dan Uni Eropa mendanai dan mengarahkan "revolusi Ukraina" dan memandang bahwa Yanukovych diberhentikan secara ilegal dan tetap menganggap Yanukovych sebagai presiden Ukraina.

Pada 26 Februari 2014, pasukan pro-Rusia mulai menguasai semenanjung Krimea. Banyak yang mempercayai bahwa pasukan tersebut merupakan personel militer Rusia. Pada saat orang-orang bersenjata menguasai gedung parlemen Krimea, anggota parlemen Krimea melakukan pemungutan suara untuk memberhentikan pemerintahan Krimea, mengganti perdana menteri dan menyerukan referendum mengenai otonomi Krimea. Tak lama kemudian, pada 16 Maret 2014, dilaksanakan referendum mengenai sikap politik Krimea untuk bergabung dengan pemerintah Federasi Rusia dengan perolehan suara 96,77% (Krimea) dan 95,6% (Sevastopol).<sup>2</sup>

Referendum ini ditentang oleh Uni Eropa, AS, Ukraina dan warga Tatar Krimea karena dipandang bertentangan dengan hukum internasional. Pada 17 Maret 2014, parlemen Krimea mendeklarasikan kemerdekaan Krimea dari Ukraina dan memutuskan untuk bergabung dengan Federasi Rusia. Pada 18 Maret 2014, Rusia dan Krimea menandatangani perjanjian

<sup>1</sup> Anastasiya Ryabchuk, "Right Revolution? Hopes and Perils of the Euromaidan Protests in Ukraine", *Debatte: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe*, 3 Februari 2014.

<sup>2</sup> *VoA News*, "Crimea Applies to join Russia", <http://www.voanews.com/content/voting-under-way-in-crimea-referendum-to-join-russia/1872380.html>, 17 Maret 2014, diakses pada tanggal 19 Mei 2014.

penggabungan Republik Krimea dan Sevastopol ke dalam Federasi Rusia. Pada 27 Maret 2014, Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 68/262 yang menyatakan bahwa referendum Krimea tidak valid dan penggabungan Krimea ke dalam Rusia adalah ilegal. Pada 15 April 2014, parlemen Ukraina mendeklarasikan Krimea sebagai wilayah yang sementara ini dianeksasi oleh Rusia. Untuk mengatasi kekisruhan politik, pada 25 Mei 2014, pemilu presiden digelar di Ukraina yang akhirnya dimenangkan oleh Petro Poroshenko, dengan suara mencapai 55,9 % mengalahkan mantan PM Yulia Tymoshenko, yang memperoleh suara sekitar 12 %.<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini akan memfokuskan pada aksi aneksasi Rusia di wilayah Krimea yang dilandasi oleh faktor historis serta faktor kedekatan kultural dan geografis. Tulisan ini dibagi ke dalam lima bagian. Bagian pertama menganalisis posisi Ukraina pasca runtuhnya Uni Soviet. Bagian kedua menganalisis latar belakang historis dari penggabungan Krimea ke dalam Ukraina. Bagian ketiga menganalisis tuntutan otonomi Krimea terhadap Ukraina. Bagian keempat menganalisis kepentingan strategis Rusia di Krimea dan keputusan Rusia menganeksasi Krimea. Bagian kelima menganalisis konsekuensi lepasnya Krimea bagi Ukraina. Bagian keenam membahas sikap Barat atas kasus Krimea.

### **Ukraina Pasca Runtuhnya Uni Soviet**

Runtuhnya Uni Soviet membawa perubahan besar bagi negara-negara pecahan Soviet dan Eropa Timur. Tat kala rezim sosialis runtuh dan pemerintahan terpusat mengalami perpecahan, kategorisasi sosial berdasarkan model ideologi menjadi tidak relevan lagi. Dalam hal ini, kebanyakan identitas nasional di negara-negara post-Uni Soviet bersifat politis dan didefinisikan oleh negara. Perubahan dari totalitarisme menjadi pluralisme politik berhubungan dengan konstruksi negara dan pembentukan kembali identitas nasional. Masalah formasi dan implementasi strategi nasional, definisi yang

<sup>3</sup> Liputan6, "Petro Poroshenko Umumkan Kemenangan pada Pilpres Ukraina", 26 Mei 2014, <http://m.liputan6.com/news/read/2054588/petro-poroshenko-umumkan-kemenangan-pada-pilpres-ukraina>, diakses pada tanggal 10 Juni 2014.

tepat dari prioritas geopolitik dan kepentingan nasional yang vital telah menjadi faktor yang menentukan dalam sejarah dan masa depan politik Ukraina.<sup>4</sup>

Perkembangan Ukraina sebagai negara independen menghasilkan perubahan penting dalam identitas nasional. Terdapat perdebatan panjang mengenai bagaimana Ukraina menempatkan dirinya dalam lingkungan keamanan Eropa yang baru, apakah berintegrasi dengan Rusia dan terikat dengan struktur militer *Commonwealth of Independent States* (CIS) ataukah (seperti halnya Polandia dan negara-negara Eropa Tengah) berintegrasi dengan Barat, meningkatkan hubungan dengan NATO, Uni Eropa, AS dan negara-negara Eropa Barat?

A. Lieven dalam bukunya "*Ukraine and Russia: A Fraternal Rivalry*", mengungkapkan bahwa Rusia dan Ukraina secara historis sangat dekat dan keterikatan kedua negara terlalu kompleks untuk dipisahkan. Lieven melihat bahwa masa depan Ukraina sebagai sebuah negara independen adalah dengan bekerja sama erat dengan Rusia. Sementara, Yaroslav Bilinsky dalam bukunya "*Endgame in NATO's Enlargement: The Baltic States and Ukraine*", menyerukan percepatan proses ekspansi NATO dengan memasukkan empat negara yang berada di perbatasan Rusia sebelah Barat (Latvia, Livonia, Estonia, dan Ukraina) dengan argumen bahwa tindakan ini akan menciptakan lingkungan keamanan yang lebih aman dan akan memperkuat stabilitas di Eropa Timur dan Tengah.<sup>5</sup>

Pemerintah Ukraina sendiri telah mengeluarkan pernyataan-pernyataan ambivalen seperti memperkuat kerja sama dengan Rusia di satu sisi, sementara di sisi lain mempererat hubungan dengan NATO secara simultan. Dalam pandangan Moskow, Ukraina adalah bagian integral dari "lingkungan" Rusia, dan status independen Ukraina seringkali dipandang sebagai fenomena temporer. Sementara itu, terdapat ketidakjelasan kepentingan dalam masalah Ukraina di Barat, dimana hal ini menyulitkan Ukraina untuk menciptakan

orientasi yang pro-Barat. Pada 1993, misalnya, Ukraina berupaya menciptakan zona stabilitas di Eropa Timur, tetapi ide ini gagal karena kurangnya dukungan dari negara-negara Eropa Barat dan Eropa Tengah. Sementara itu, Presiden Leonid Kravchuk menggunakan nasionalisme untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan reformasi ekonomi. Kravchuk mengembangkan politik luar negeri yang menyeimbangkan Rusia dengan Barat namun dilandasi oleh nasionalisme Ukraina yang justru memperburuk hubungan dengan Rusia. Kravchuk justru menggambarkan Rusia sebagai sumber utama ketidakstabilan dan ketidakamanan Ukraina. Leonid Kuchma, yang menggantikan Kravchuk pada 1997, tidak banyak mengubah politik luar negeri Ukraina. Meski Kuchma dituduh lebih pro-Rusia, namun dirinya tetap berpegang pada politik luar negeri yang dilandasi nasionalisme Ukraina.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, konsep "nation" di Ukraina masih belum terdefiniskan dengan jelas. Beberapa politisi memandang bahwa Ukraina dapat menemukan identitas nasional yang riil dengan membedakan dirinya dari kultur dan ideologi Rusia dan dengan mendorong nasionalisme etnis di Ukraina. Yaroslav Bilinsky mengungkapkan bahwa "*to build Ukraine as a non-ethnic-based civil society has not worked out*". Namun, pendekatan ini mendapat kritikan dari Andrew Wilson dan Alexander Motyl yang menegaskan bahwa nasionalisme etnis tidak mesti dipersepsikan sebagai kepentingan vital sebuah bangsa. Ukraina seringkali dipandang sebagai sebuah masyarakat terbelah dengan komunitas pro-Rusia yang kuat terdiri dari minoritas Rusia dan warga Ukraina yang berbahasa Rusia. Sekitar 55% populasi Ukraina lebih memilih menggunakan bahasa Rusia untuk berkomunikasi di rumah. Bahkan, dua pertiga dari seluruh populasi Ukraina menyatakan bahwa Rusia sebagai bahasa pertama mereka.<sup>7</sup>

Wilayah Krimea saat ini mencerminkan situasi seperti digambarkan di atas, yang merefleksikan perubahan politik, sosial dan ekonomi terkini yang terjadi di Ukraina. Sejak tahun 1920, Krimea merupakan bagian dari

<sup>4</sup>Carina Korostelina, "The Multiethnic State-building Dilemma: National and Ethnic Minorities' Identities in the Crimea", *National Identities*, Vol. 5, No.2, 2013, hlm. 142.

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 143.

<sup>7</sup>*Ibid.*

Federasi Rusia, namun pada 1954 ditransfer ke Republik Sosialis Soviet Ukraina, dan terakhir dimasukkan ke dalam negara independen Ukraina pada tahun 1991. Populasi Krimea sekitar hampir 2,5 juta jiwa. Etnis Rusia meliputi 64% populasi; 23% adalah etnis Ukraina; 10% etnis Muslim Tatar Krimea; dan 3% terdiri atas etnis Belarusia, Armenia, Yunani, Jerman, Yahudi dan etnis lainnya.<sup>8</sup>

Pada 18 Mei 1944, sejumlah 250.000 warga Tatar Krimea yang dituduh berkolaborasi dengan Jerman selama okupasi, dideportasi dari Krimea. Sejumlah 40% dari mereka meninggal, baik pada saat dideportasi maupun selama tahun pertama dari dua tahun penempatan di “zona khusus” di Uzbekistan. Selama sepuluh tahun terakhir, diperkirakan setengah dari populasi etnis Tatar yang dideportasi telah kembali ke tanah kelahiran mereka. Namun kenyataannya, etnis Tatar yang telah kembali ke Krimea, tidak mendapatkan akses pendidikan, pekerjaan dan perumahan. Sebagai akibatnya, hubungan antara etnis Slavia Krimea dengan Tatar Krimea mengalami ketegangan. Salah satu problem utamanya adalah sejumlah 98.800 warga Tatar yang telah kembali ke Krimea tidak memiliki kewarganegaraan Ukraina, dan mayoritas (sekitar 64.100) tetap mempertahankan paspor Uzbekistan. Sementara, hukum Ukraina melarang warganya memegang dua status kewarganegaraan. Berdasarkan hukum Ukraina, calon warga negara dari etnis Tatar harus meninggalkan kewarganegaraan Uzbekistan. Sebagai protes atas kebijakan itu, sejumlah 20.000 warga Tatar melakukan demonstrasi di Simferopol pada bulan Mei 1999. Sementara itu, etnis Rusia yang tinggal di Krimea, menyimpan impian dari Alexander Solzenitsyn,<sup>9</sup> bahwa suatu saat nanti Ukraina, Belarusia, dan etnis Slavia di utara Kazakhstan akan bergabung dalam Rusia Raya, yang dipersatukan oleh ikatan darah, sejarah, dan keyakinan Kristen Ortodoks Rusia.<sup>10</sup>

Pada 26 Agustus 1991, parlemen Ukraina melakukan pemungutan suara dengan hasil 346

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Alexander Solzenitsyn adalah salah satu penulis roman Rusia besar abad ke-20 yang meraih penghargaan Nobel dalam Sastra pada 1970.

<sup>10</sup> Korostelina, *op.cit.*, hlm. 143.

suara mendukung kemerdekaan Ukraina. Pada 1 Desember 1991, warga Ukraina melakukan pemungutan suara untuk mendukung kemerdekaan Ukraina. Bahkan, warga etnis Ukraina yang minoritas di Krimea turut memberikan suara. Besarnya suara yang mendukung kemerdekaan di Ukraina mengecewakan Rusia. Hal ini mengingat survei yang dilakukan sebelum Agustus 1991 di Moskow menyebutkan hanya 9% warga Krimea mendukung kemerdekaan Ukraina.<sup>11</sup>

Pertanyaannya kemudian, mengapa mayoritas warga Krimea (hampir 85 %) mendukung kemerdekaan pada 1 Desember 1991? Hal ini menurut Korostelina berkaitan dengan pengaruh opini populer bahwa Ukraina dapat mengelola ekonomi secara mandiri dan perdebatan mengenai kedaulatan yang telah diawali oleh negara-negara Balkan pada 1990-1991. Persepsi populer yang berkembang pada saat itu adalah Ukraina lebih bekerja keras dan lebih terorganisir ketimbang Rusia. Terlebih lagi, kedaulatan dan kemerdekaan di Krimea tidak bergantung pada etnis, budaya dan nasionalisme linguistik dari elit kultural di Kiev dan Ukraina Barat, melainkan didasarkan pada faktor ekonomi. Hal ini menjadi argumen teritorial untuk penentuan nasib sendiri, yang mempengaruhi etnis Rusia dan etnis Ukraina berbahasa Rusia di Krimea pada saat pemungutan suara pada 1991.<sup>12</sup>

### **Posisi Strategis Krimea di antara Ukraina dan Rusia**

Ukraina menempati wilayah strategis di antara Uni Eropa, Federasi Rusia, dan wilayah Laut Hitam Turki. Dalam sejarah, Ukraina merupakan “battle ground” bagi kekuatan dunia kala itu<sup>13</sup>, yakni Grand Duchy Lithuania, Kekaisaran Ottoman, the Polish-Lithuanian Commonwealth, Crimean Tatar Khanate dan Muscovy. Di masa modern, wilayah ini merupakan persinggungan antara wilayah kekuasaan Rusia, Habsburg, dan Ottoman. Dalam batas kontemporer, Ukraina

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Gwendolyn Sasse, *the Crimea Question: Identity, Transition and Conflict*, (Cambridge: Harvard University Press, 2007), hlm. 1.

muncul pertama kali dalam sejarah sebagai negara independen. Semenanjung Krimea terletak di sebelah selatan Ukraina, memisahkan Laut Azov dari Laut Hitam yang membuat kekuatan dunia menginginkan kontrol atas wilayah maritim (lihat Peta Krimea). Lokasinya yang strategis itu menjadi rebutan bagi Kekaisaran Ottoman dan Rusia dan kedua kekuatan dunia tersebut meninggalkan jejak yang kuat di semenanjung Krimea.<sup>14</sup>

menarik adalah, Majelis Nasional Tatar Krimea (Kurultay) yang pertama kali memunculkan nama “Krimea” (*Qirim*) merujuk pada Revolusi Oktober.<sup>15</sup> Dalam sejarahnya, etnis Tatar Krimea berasal dari anggota Golden Horde Turki yang didirikan oleh Batu Khan di awal abad ke-13. Menyusul penaklukan Krimea oleh Golden Horde pada pertengahan abad ke-13, kelompok etnis Turki ini didorong untuk menetap disana,



Sumber: BBC.com, <http://www.bbc.com/news/world-europe-26595776>, diakses pada tanggal 19 Mei 2014.

**Gambar 1.** Peta Krimea

Selama dua abad, semenanjung Krimea berada di bawah kekuasaan Kekaisaran (Turki dan Rusia) dan di bawah pemerintahan Komunis Rusia, dan ini merupakan kekuasaan ‘asing’ terakhir yang berkuasa di Krimea. Krimea dikuasai Rusia setelah serangkaian serangan militer melawan Kekaisaran Ottoman pada 1783. Historiografi di masa Tsar Rusia dan Uni Soviet tidak pernah menampilkan Krimea sebagai teritori dari satu kelompok nasional. Yang

menggantikan populasi etnis Slavia. Wilayah tersebut dipimpin oleh sejumlah gubernur yang ditunjuk oleh Tatar Khan yang berbasis di kota Saray di bawah wilayah Volga. Hingga akhir abad ke-14, Krimea dan ibukotanya, Solhat, digunakan oleh Tatar Khan sebagai wilayah semi-netral dalam hubungan diplomatik dengan dinasti Mamluk Turki di Mesir.<sup>16</sup>

Di bawah slogan “Crimea for Crimeans” (Krimea untuk rakyat Krimea), Kurultay dan

<sup>14</sup> Elena Mizrokhi, “Russian ‘separatism’ in Crimea and NATO: Ukraine’s Big Hope, Russia’s Grand Gamble”, *Chaire de recherche du Canada*, 2009, hlm 2, [http://www.psi.ulaval.ca/fileadmin/psi/documents/Documents/Travaux\\_et\\_recherches/Crimee.pdf](http://www.psi.ulaval.ca/fileadmin/psi/documents/Documents/Travaux_et_recherches/Crimee.pdf), diakses pada tanggal 4 Mei 2014.

<sup>15</sup> Sasse, *op.cit.*, hlm. 44.

<sup>16</sup> David R. Marples & David F. Duke, “Ukraine, Russia, and the Question of Crimea”, *Nationalities Papers*, Vol. 23, No. 2, 1995, hlm. 262.

Partai Nasional (*Milli Firqa*) mengajukan multietnis Krimea sebagai unit otonom dalam Federasi Rusia. Permintaan ini tidak diterima oleh pemerintah pusat Soviet dan justru merespon dengan membungkam para cendekiawan Tatar. Pada 1930an – periode represi dan pemaksaan kolektivisasi di Uni Soviet – hasilnya 35 hingga 40 ribu warga Tatar Krimea, dari total populasi 200 ribu, dideportasi ke Siberia. Sejumlah besar warga Tatar yang belum tersentuh tidak bisa menghindari deportasi massal di akhir Perang Dunia II yang kemudian dikirim ke Republik Asia Tengah Soviet seperti Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan dan beberapa wilayah lainnya di Uni Soviet. Sebagai gantinya, Soviet mengirim penduduk etnis Slavia/Rusia ke Krimea pada 1930an di bawah kebijakan pembangunan regional Soviet.<sup>17</sup> Perubahan demografis ini mempengaruhi keseimbangan etnis di wilayah itu. Setelah Perang Dunia II, karakter Krimea lebih ditekankan pada etnis Slavia/Rusia. Dalam konsepsi historis yang baru, etnis Tatar Krimea muncul sebagai warga asing sehingga keterikatan historis mereka dengan teritori Krimea diabaikan. Pendekatan revisionis ini merupakan bagian dari kebijakan Stalin pada masa deportasi 1944, untuk menghilangkan keberadaan etnis Tatar Krimea yang telah lama hadir dan memperkaya khazanah budaya di semenanjung Krimea.<sup>18</sup>

Wilayah Krimea ditransfer dari Rusia ke Ukraina pada 1954. Hal ini terjadi dalam rangka merayakan ulang tahun ke-300 Perjanjian Perevaslav yang ditandatangani antara Hetman Bohdan Khmelnytsky dari Ukraina dan Tsar Rusia Aleksei Mikhailovich. Pada Februari 1954, pemerintah Rusia mengeluarkan petisi kepada pemerintah Soviet untuk menyetujui transfer tersebut. Pada 19 Februari 1954, seluruh pihak yang berkepentingan di Rusia, Ukraina dan Krimea memperdebatkan isu tersebut, termasuk ketua dewan kota Simferopol dan Sevastopol, dan P. Lyalin, Deputi Pertama Dewan Provinsi Krimea.<sup>19</sup> Transfer wilayah Krimea kemudian dibenarkan dengan beberapa kriteria antara

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

<sup>19</sup> *Oblast* adalah sebuah pembagian administratif yang dipakai oleh negara-negara Slavia, sebuah istilah dari bahasa Rusia yang artinya adalah “daerah”, “wilayah” atau “provinsi”.

lain: sistem ekonomi yang sama dan kedekatan teritorial; kedekatan ekonomi dan hubungan kultural antara Provinsi Krimea dan Ukraina. Dekrit tersebut disetujui secara hukum pada 26 April 1954 dan disetujui oleh Kruschev.<sup>20</sup> Transfer Krimea ke Ukraina ini terjadi pada periode de-Stalinisasi setelah kematiannya. Yang terjadi kemudian, setelah Krimea diberikan kepada Ukraina, konstitusi etnis dan linguistiknya telah mengalami transformasi sebagai akibat kebijakan deportasi Soviet atas populasi Tatar.

Elena Mizrokhi mengungkapkan bahwa terdapat tiga pandangan dalam sejarah Krimea yang muncul dari tiga kelompok etnis yang ada di wilayah itu. Etnis Tatar memandang bahwa keberadaan kelompok etnis Tatar sejak abad ke-15 hingga ke-18 menjadi bukti bahwa mereka satu-satunya penduduk asli Krimea sehingga Krimea merupakan satu-satunya tanah air mereka. Sedangkan dalam pandangan Rusia, Krimea secara alamiah merupakan bagian dari Rusia, sementara Tatar merupakan bagian dari invasi dan kolaborator asing. Krimea dipandang sebagai bukti kejayaan Catherine Agung dan Kekaisaran Tsar Rusia. Sementara bagi Ukraina, Krimea selalu terkait dengan Ukraina berdasarkan geografi, budaya, dan etnisitas, termasuk di masa Ukraina masih menjadi bagian Rusia. Ketiga narasi yang berkompetisi ini menjadi faktor penyebab problematika di Krimea. Ketiganya juga menjelaskan mengapa terjadi ketegangan etnis di Krimea dan mengapa problematika itu menimbulkan respon panas dari ketiga komunitas di semenanjung Krimea, dari pemerintah pusat Ukraina, dan dari pihak ketiga, Federasi Rusia.<sup>21</sup>

Orientasi pro-Rusia di Krimea merupakan hasil kesadaran nasional populasi Rusia di semenanjung Krimea, sekaligus menimbulkan resiko separatisme di Krimea. Namun, gerakan nasionalis ini cenderung tidak berkelanjutan karena ketidakjelasan identitas Rusia dan Soviet. Kenyataannya, Krimea masih bersifat konfliktual bagi masa depan semenanjung itu. Pertama, tidak semua warga menginginkan Krimea pisah dari Ukraina. Sementara itu, etnis mayoritas di Krimea menyuarakan aspirasi untuk bergabung

<sup>20</sup> Marples dan Duke, *op.cit.*, hlm. 271-272.

<sup>21</sup> Elena Mizrokhi, *op.cit.*, hlm 3.

dengan Rusia. Dalam situasi ini, muncul gagasan dwi-kewarganegaraan, yang mengilustrasikan aspirasi warga di Ukraina Timur dan Barat, dalam rangka memperoleh status baru yang mengakomodir aspirasi komponen Rusia di wilayah Ukraina. Sikap warga Ukraina juga bersifat ambivalen dimana para penduduk tertarik kepada Rusia dan Ukraina, tetapi tidak pernah benar-benar berhubungan secara intens satu sama lainnya. Penting untuk diperhatikan bahwa meski Rusia merupakan etnis mayoritas di Krimea, namun bukan hanya mereka satu-satunya yang menginginkan kebijakan yang lebih pro-Rusia di wilayah Krimea, dan Ukraina secara keseluruhan. Oleh karena itu, bisa diungkapkan bahwa iklim politik di wilayah itu merupakan “*mirror-image*” dari iklim etnis yang tidak sepenuhnya pro-Ukraina ataupun pro-Rusia, tetapi berkisar di antara keduanya.<sup>22</sup> Semenanjung Krimea, dimana mayoritas warga etnis Rusia-nya tidak sepenuhnya beraliansi dengan Rusia (seperti kasus Abkhazia dan Ossetia Selatan), menjadi simbol ambisi kekuasaan Rusia di semenanjung tersebut.

### Tuntutan Otonomi Krimea

Munculnya “separatisme Rusia” di Krimea mewarnai iklim politik di era 90an. Potensi konflik di Krimea muncul pada pertengahan 1990 yang disebabkan oleh dua faktor. Pertama, minoritas Muslim Tatar<sup>23</sup> yang mengalami sejarah pembersihan etnis dan yang terkini mengalami diskriminasi sosio-ekonomi dan politik di bawah Ukraina. Faktor kedua yang mengancam keseimbangan di semenanjung adalah kehadiran sejumlah besar minoritas Rusia<sup>24</sup> dimana setelah runtuhnya Uni Soviet merasa “asing” di dalam negara merdeka Ukraina. Kenyataannya, “separatisme” Krimea, pada awalnya tidak diusung oleh etnis Rusia Krimea, melainkan oleh etnis Tatar dan kelompok Komunis yang sangat

aktif dalam arena politik. Koalisi “Rusia” sendiri baru terbentuk pada tahun 1993.<sup>25</sup>

Di era reformasi Gorbachev (1984-1991) beberapa gerakan politik (pro-Ukraina, komunis, dan pro-Rusia) tumbuh di Krimea dan bertransformasi ke dalam partai politik. Partai-partai ini mulai dengan tuntutan restorasi otonomi Krimea, dengan mengedepankan status khusus Krimea pada 1989, dan kemudian menuntut dilakukannya referendum regional mengenai status semenanjung untuk bergabung dengan referendum nasional mengenai masa depan Ukraina pada 1 Desember 1991. Inilah untuk pertama kalinya Partai Komunis Krimea mulai memobilisir opini publik untuk mendukung “penentuan nasib sendiri” (*self-determination*) Krimea. Pemilu lokal pada Maret 1990, mengonfirmasi peran Partai Komunis dalam pemerintahan regional, dan perdebatan mengenai otonomi semakin intensif.<sup>26</sup>

Langkah nyata untuk merestorasi otonomi diambil oleh Provinsi Soviet Krimea pada September 1990, yang mengadopsi pernyataan yang disampaikan ke Uni Soviet dan parlemen tertinggi Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia berkaitan dengan keinginan untuk menghapus keputusan yang dibuat pada 1945-46 dalam hal perubahan status otonom Republik Soviet Sosialis menjadi *oblast*, yakni unit administratif yang secara hierarki berada di bawah republik. Gerakan ini dipimpin oleh Nikolai Bagrov, ketua parlemen Krimea. Tuntutan yang berkaitan dengan status Krimea mendapatkan momentum setelah deklarasi Ukraina sebagai negara berdaulat pada Juli 1990. Gerakan separatis yang ada sejak awal 1990, dimana kelompok Rusia merepresentasikan gelombang terakhir, harus dipandang dalam konteks dan reaksi atas nasionalisme Ukraina.<sup>27</sup>

Dorongan untuk kemerdekaan di semenanjung Krimea terus berlangsung. Parlemen tertinggi Soviet Krimea mengeluarkan deklarasi mengenai status hukum dan kenegaraan Krimea dengan menyatakan bahwa penghapusan status otonomi Krimea adalah inkonstitusional dan

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>23</sup> Berdasarkan hasil Sensus Ukraina 2001, populasi Tatar Krimea di wilayah Republik Otonom Krimea adalah 243.400 jiwa (12%) dari total populasi 2.024.000 jiwa.

<sup>24</sup> Berdasarkan hasil Sensus Ukraina 2001, populasi etnis Rusia di wilayah Republik Otonom Krimea adalah 1.180.400 jiwa (58,3%) dari total populasi 2.024.000 jiwa.

<sup>25</sup> Mizrokhi, *op.cit.*, hlm. 5.

<sup>26</sup> Sasse, *op.cit.*, hlm. 135.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

mempertahankan status Krimea dalam bentuk Republik Soviet Sosialis Otonom Krimea. Di saat yang sama, para deputi sepakat mengadakan referendum mengenai status kemerdekaan Krimea pada 20 Januari 1991. Referendum yang diikuti oleh 81,4% pemilik suara, menghasilkan 93,3% mendukung pembentukan Republik Soviet Sosialis Otonom Krimea. Namun, mayoritas etnis Tatar memboikot referendum dan menegaskan bahwa mereka juga berhak menentukan nasib Krimea. Pembentukan Republik Soviet Sosialis Otonom Krimea pada 1991 merupakan restorasi Republik Soviet Sosialis Otonom pertama dan terakhir kalinya yang didukung rakyat.<sup>28</sup>

Partai-partai lokal yang mendukung kemerdekaan berupaya menggunakan momentum suksesnya referendum pertama. Referendum lokal lainnya mengenai kemerdekaan Republik Krimea dilakukan di awal 1992 dan dalam beberapa bulan Gerakan Republik Krimea<sup>29</sup> berhasil mengumpulkan 180.000 tanda tangan sebagai syarat hukum untuk melaksanakan referendum yang juga menjadi simbol konfrontasi langsung dengan Ukraina. Tak lama kemudian, sebelum penentuan jadwal referendum diputuskan parlemen Krimea, Presiden Ukraina Leonid Kravchuk, mengeluarkan pernyataan keras menentang referendum dan menegaskan bahwa referendum diorganisir oleh separatis yang menginginkan situasi destabilisasi di antara rakyat Krimea, juga dalam hubungan Ukraina-Krimea, serta hubungan Ukraina-Rusia. Dalam situasi ini, baik pihak Ukraina maupun Krimea tidak siap untuk berkompromi.<sup>30</sup>

Di saat pemimpin Krimea memfokuskan diri dengan ambisi separatis, pemerintah pusat Ukraina menginisiasi langkah awal menuju negara federalis sebagai solusi atas ketegangan di semenanjung. Parlemen Ukraina mengeluarkan draft UU Pembagian Kekuasaan antara Ukraina dan Republik Krimea. Dokumen yang disetujui

kedua belah pihak, mendefinisikan Krimea sebagai bagian otonom dari Ukraina. Namun, versi final dari perjanjian itu berbeda dengan versi awal. Hal ini dipandang oleh otoritas Krimea dan Muslim Tatar sebagai pengkhianatan. Majelis Tatar menentang perjanjian pembagian kekuasaan antara Ukraina dan Krimea karena dilakukan tanpa persetujuan rakyat Tatar Krimea. *Mismanagement* yang dilakukan Ukraina dalam perjanjian pembagian kekuasaan menjadi katalis bagi seruan otonomi Krimea sehingga insiden ini meluas menjadi karakter separatis.<sup>31</sup>

Ketegangan memuncak pada 5 Mei 1992, tatkala *Crimean Verkhovna Rada* (Parlemen Krimea), yang dimotori oleh Yuri Meshkov, pemimpin Partai Republik Krimea mengadopsi UU Kemerdekaan Krimea dan konstitusi baru. Parlemen juga melaksanakan referendum mengenai kemerdekaan pada 2 Agustus 1992. Konstitusi Krimea yang baru sangat ambigu karena menyatakan Republik sebagai sebuah negara, namun juga menegaskan posisinya di dalam Ukraina. Dengan mengadopsi konstitusi dan mengancam referendum kemerdekaan, Nikolai Bargov menginginkan Kiev untuk membuat konsesi dan bernegosiasi dengan tawaran yang lebih baik. Menanggapi hal ini, parlemen Ukraina melakukan intervensi. Pada 13 Mei 1992, Parlemen Ukraina menolak UU Kemerdekaan Krimea dan menyatakan sebagai inkonstitusional dan memerintahkan Parlemen Krimea membatalkannya dalam waktu dua minggu. Presiden Kravchuk dan pemimpin Krimea, Barghov, melakukan kompromi yang menyangkut tuntutan bahwa parlemen Krimea membatalkan referendum. Kedua pihak kemudian menyetujui status Krimea sebagai bagian konstituen dari Ukraina yang kemudian dideklarasikan oleh Parlemen Krimea setelah Juni 1992. Setting politik di semenanjung ini kemudian menjadi penyebab munculnya gerakan yang lebih radikal.<sup>32</sup>

## Kepentingan Strategis Rusia di Krimea

Keterlibatan Rusia dalam politik Krimea, khususnya yang berkaitan dengan kemerdekaan

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

<sup>29</sup> *The Republican Movement for Crimea* didirikan oleh Yuri Meshkov pada 19 November 1992. Kemudian pada 24 Oktober 1992 berubah menjadi *the Republican Party of Crimea*. Partai ini adalah partai politik separatis regional yang memperjuangkan pemisahan diri Krimea dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia.

<sup>30</sup> Mizrokhi, *op.cit.*, hlm 6.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 7.



di semenanjung tersebut, merupakan akibat dari perasaan residual di antara politisi Rusia bahwa Krimea adalah bagian dari sejarah dan wilayah integral Rusia. Federasi Rusia sulit menerima kemerdekaan Ukraina setelah pecahnya Uni Soviet. Persepsi ini diyakini oleh kelompok komunis dan nasionalis radikal Rusia. Deputi Komunis Duma (Majelis Rusia) dan Deputi Komite Duma untuk geopolitik, Yuri Nikiforenko memberikan penjelasan mengenai reunifikasi Rusia dan Ukraina dalam debat pada bulan Maret 1998 mengenai ratifikasi Perjanjian Persahabatan Rusia-Ukraina. Nikiforenko menegaskan bahwa Rusia tidak menginginkan separuh Ukraina, melainkan seluruh Ukraina termasuk rakyatnya agar mendukung reunifikasi tersebut.<sup>33</sup> Walikota St. Petersburg, Anatoly Sobchak, berargumen bahwa Krimea tidak pernah menjadi bagian Ukraina dan tidak ada dasar hukum atau moral bagi Ukraina untuk mengklaim Krimea.<sup>34</sup>

Opini publik tampaknya juga setuju dengan pandangan nasionalistik ini. Dalam polling yang diadakan pada 1992, 51% responden berpandangan Rusia dan Ukraina seharusnya tergabung dalam satu negara, dan 31% berpandangan kedua negara tetap terpisah tapi dengan perbatasan terbuka. Hanya 8% yang berpandangan bahwa kedua negara harus mengembangkan hubungan yang normal seperti dengan negara lain (kontrol perbatasan, peraturan visa, pajak, dan lain-lain).<sup>35</sup>

Retorika nasionalis yang kuat dari lingkungan tertentu politik Rusia diikuti oleh resolusi legislatif. Pada pertengahan 1992, Komite Hubungan Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Eksternal diketuai oleh Vladimir Lukin, salah satu pendiri partai liberal demokratik Rusia, Yabloko, mendistribusikan mosinya kepada para penegak hukum Rusia bahwa keputusan yang dibuat parlemen tertinggi Soviet Rusia tahun 1954 adalah invalid dan tidak memiliki kekuatan hukum. Sebagai konsekuensinya, parlemen Rusia melakukan pemungutan suara untuk mengadopsi resolusi yang menginstruksikan dua komitennya meninjau kembali konstitusionalitas

dari keputusan 1954. Selama kurun waktu 1992-1993, parlemen Rusia meningkatkan tuntutanannya atas Krimea dan Sevastopol. Akhirnya pada 23 Januari 1992, Duma dan Kementerian Luar Negeri menentang transfer Krimea ke Ukraina, yang menimbulkan protes keras dari Ukraina. Hubungan Rusia-Ukraina memburuk setelah deklarasi ini. Wakil Presiden Rusia Alexander Rutskoi mengunjungi Krimea pada 1992 dan menyerukan pemisahan wilayah dari Ukraina dan sebulan kemudian parlemen Rusia mengeluarkan resolusi mendeklarasikan bahwa transfer Krimea ke Ukraina pada 1954 adalah ilegal.<sup>36</sup>

Aktifnya seruan Duma bagi kemerdekaan Krimea dan/atau reunifikasi dengan Rusia muncul setelah Meschkov memegang kekuasaan di Krimea. Kerja sama antara Krimea dan Rusia ini memberikan tekanan ganda kepada Kiev. Namun, politisi *mainstream* Rusia tidak tertarik untuk mengusung persoalan status Krimea dalam Ukraina, dan lebih mengutamakan status stasiun Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol. Dalam hal ini, Presiden Rusia Boris Yeltsin, menjaga jarak dari resolusi parlemen. Kenyataannya, anggota elit politik Rusia yang mendukung gerakan separatistis Rusia di Krimea merupakan pengkritik pemerintahan Yeltsin. Sementara pemerintah Rusia menerapkan kebijakan moderat dalam persoalan di semenanjung Krimea, namun Yeltsin, melalui Dubes Rusia di Ukraina, berpandangan bahwa Sevastopol, stasiun Armada Laut Hitam harus disewakan kepada Rusia. Dalam beberapa kesempatan, Yeltsin menegaskan bahwa persoalan Krimea merupakan masalah internal Ukraina. Namun, kebijakan aktual Kremlin, seringkali kontradiktif dengan posisi resmi pemerintah dalam persoalan Krimea. Misalnya, pada Mei 1992, perjanjian pembagian kekuasaan akhirnya tercapai antara delegasi parlemen Krimea dan Ukraina. Untuk merespons hal ini, Yeltsin, mengutus Rutskoi ke Krimea, sebagai ketua delegasi. Di Sevastopol, Rutskoi, menegaskan kembali klaim Rusia atas Krimea, bahwa pandangan umum menyatakan bahwa semenanjung Krimea merupakan bagian dari Rusia. Dalam hal ini, netralitas Yeltsin

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>34</sup> Sasse, *op.cit.*, hlm. 15.

<sup>35</sup> Mizrokhi, *op.cit.*, hlm. 8.

<sup>36</sup> *Ibid.*

dipertanyakan dengan melihat pernyataan utusannya sendiri.<sup>37</sup>

Tahun 1993 menandai perubahan dalam politik luar negeri Rusia, menjauhi, apa yang disebut Andrei Kozyrev, orientasi atlantis pro-Barat, menjadi lebih nasionalistik, yang mencerminkan dukungan terhadap separatisme Krimea. Pada pertengahan Juli 1993, ketika parlemen Rusia mengeluarkan instruksi untuk mempersiapkan draft UU “untuk mengabadikan status federal dari kota Sevastopol dalam Konstitusi Federasi Rusia”, terdapat 166 suara mendukung, dan 1 suara menolak. Perubahan ini terjadi setelah kemenangan partai Komunis dan nasionalis ekstrim pada pemilu Duma Rusia, Desember 1993. Tentu saja, retorika Rusia atas isu Krimea ditujukan untuk “konsumsi” domestik di Rusia, khususnya untuk kemenangan pemilu. Persepsi patriot Rusia bahwa Armada Laut Hitam dan persoalan Krimea saling berkaitan, menguat, salah satunya dipengaruhi oleh publikasi kutipan surat yang dikirim oleh Lukin kepada Ruslan Khasbulatov, ketua Parlemen Tertinggi Soviet Rusia yang merekomendasikan Krimea sebagai kartu tawar dalam perselisihan mengenai armada. Dalam konteks ini, elit puncak Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet, ingin memberi tekanan kepada Ukraina melalui ancaman konflik sosial di Krimea (dan keterlibatan militer Rusia di dalamnya) dalam rangka mengamankan aksesnya ke Sevastopol.<sup>38</sup>

Pada April 2010, dilakukan perjanjian antara pemerintah Ukraina dengan Rusia yang dikenal dengan nama “*Fleet for gas*” sebagai barter untuk perpanjangan masa penyewaan Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol dimana Ukraina memperoleh diskon harga 30% untuk impor gas dari Rusia. Perjanjian yang ditandatangani pada 21 April 2010 antara Presiden Yanukovich dengan Presiden Medvedev memutuskan bahwa Rusia mendapat konsesi perpanjangan masa sewa hingga 25 tahun setelah 2017 dengan tambahan 5 tahun masa sewa (dari 2042-2047).<sup>39</sup> Perjanjian ini dianggap kontroversial di Ukraina.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm 9-10.

<sup>39</sup> Ivan Watson & Maxim Tkachenko, “Russia, Ukraine Agree on Naval Base-for-Gas Deal”, <http://edition.cnn.com/2010/WORLD/europe/04/21/russia.ukraine/index.html?hpt=T2>, 21

## Aneksasi Rusia di Krimea

Aneksasi Rusia di Semenanjung Krimea pada Februari dan Maret 2014, telah membawa Eropa ke dalam krisis sejak berakhirnya Perang Dingin. Invasi Rusia di wilayah Ukraina ini merupakan eskalasi taktik yang telah digunakan Kremlin selama dua dekade terakhir dalam mempertahankan pengaruhnya di bekas wilayah Uni Soviet. Sejak 1990an, Rusia telah mendukung secara langsung maupun berkontribusi dalam pecahnya empat wilayah etnis di Eurasia, seperti Transnistria, sebuah negara di Moldova yang mendeklarasikan kemerdekaan, yang terletak di antara Sungai Dniester dan Ukraina; Abkhazia, di pantai Laut Hitam Georgia; Ossetia Selatan, di utara Georgia; dan Nagorno-Kharabakh, wilayah pegunungan di barat daya Azerbaijan yang mendeklarasikan kemerdekaannya di bawah perlindungan Armenia, menyusul terjadinya perang sipil yang brutal. Dalam kasus ini, Moskow, telah menciptakan, apa yang disebut dengan “*frozen conflict*” di negara-negara ini, dimana wilayah yang memisahkan diri berada di luar kontrol pemerintah pusat, sementara otoritas *de facto* lokal, menikmati proteksi dan pengaruh Rusia.<sup>40</sup>

Hingga Rusia menganeksasi Krimea, situasi di semenanjung berjalan sesuai dengan skenario yang telah dikenal. Moskow menggunakan ketegangan etnis dan menggelar kekuatan militer terbatas ketika terjadi kekisruhan politik, sebelum mendorong revisi teritorial yang mengizinkan Moskow menginjakkan kakinya di wilayah yang bertikai. Dalam kasus aneksasi Krimea, Rusia telah meninggalkan taktik lama dan berani meningkatkan resiko. Keberanian Rusia bertindak jauh di Krimea, dibandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya, didorong oleh faktor strategis Ukraina bagi Rusia dan keinginan kuat Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menunjukkan konfrontasinya dengan Barat, yang dipandang elit Rusia sebagai hipokrit dan antagonis terhadap kepentingan Rusia. Dengan melihat intervensi Rusia di beberapa bekas wilayah Soviet, dapat diasumsikan bahwa

April 2010, diakses pada tanggal 5 Oktober 2014.

<sup>40</sup> Jeffrey Mankoff, “Russia’s Latest Land Grab: How Putin Won Crimea and Lost Ukraine”, *Foreign Affairs*, Vol. 93, No. 3, Mei/Juni 2014.

strategi yang dijalankan Rusia berhasil di masa lalu. Namun, apabila diamati lebih jauh, setiap kali Rusia mengancam integritas negara tetangga dalam upaya mempertahankan pengaruhnya, hasilnya justru kontra produktif bagi Rusia. Dukungan Moskow kepada gerakan separatis dalam perbatasan mereka, telah membuat negara-negara seperti Azerbaijan, Georgia, dan Moldova, menghentikan ketergantungan mereka terhadap Rusia dan memulai kerja sama dengan Barat. Dalam konteks ini, Jeffrey Mankoff mengungkapkan bahwa Ukraina kemungkinan akan mengikuti pola yang sama. Dengan menganeksasi Krimea dan mengancam intervensi militer di wilayah timur Ukraina (Donetsk dan Luhansk), Rusia hanya akan mendorong nasionalisme Ukraina dan mendorong Kiev mendekati diri dengan Eropa.<sup>41</sup>

Dalam beberapa kasus di atas, Rusia melakukan intervensi ketika pengaruhnya terancam. Dalam beberapa kesempatan, Rusia secara konsisten mengklaim bahwa negaranya bertindak dalam kerangka tanggung jawab untuk melindungi (*responsibility to protect*) kelompok minoritas yang terancam. Namun, dalam kenyataannya, Rusia lebih mengedepankan keuntungan strategis dibandingkan dengan pertimbangan humanitarian dan etnonasional. Komitmen untuk melindungi etnis Rusia yang terancam dan populasi minoritas lainnya di luar Rusia mungkin berhasil untuk konsumsi domestik, namun keinginan pemerintah Azerbaijan, Georgia, dan Moldova untuk keluar dari orbit geopolitik Rusia-lah yang menyebabkan Moskow melakukan intervensi. Pada saat terjadi aneksasi Krimea, Putin dan pemerintahannya secara hati-hati berbicara mengenai perlindungan terhadap “warga Rusia” (orang-orang yang mendapatkan paspor Moskow) dan “warga berbahasa Rusia” (termasuk mayoritas warga Ukraina) ketimbang merujuk secara langsung pada “etnis Rusia”.<sup>42</sup>

Penting untuk dicatat bahwa meski Rusia merasa bebas melakukan intervensi politik dan militer di semua kasus (kecuali di Krimea), Rusia tidak pernah secara formal melakukan aneksasi wilayah atau mengganti pemerintah lokal.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

Sebaliknya, Rusia menuntut perubahan politik luar negeri di Azerbaijan, Georgia, dan Moldova, dengan berupaya menahan aspirasi Georgia untuk bergabung dengan NATO. Melebihi konflik di awal 1990an dan di Georgia pada 2008, Kremlin menganggap aneksasi di Krimea sebagai serangan langsung terhadap Barat, termasuk juga Ukraina. Putin meyakini bahwa dirinya dan Rusia memperoleh hasil lebih, dari konfrontasi dengan AS dan Eropa, yakni konsolidasi posisi politiknya di Rusia dan meningkatkan status internasional Moskow, ketimbang bekerja sama dengan Barat.<sup>43</sup>

Meski terdapat perbedaan aksi dalam kasus Krimea, namun yang tidak berubah dalam taktik Kremlin sejak masa Uni Soviet adalah pandangan paternalistik Rusia terhadap negara-negara tetangga pasca Soviet. Rusia terus menganggap mereka sebagai wilayah pengaruhnya, dimana Moskow memiliki “kepentingan khusus”, seperti yang diungkapkan oleh PM Rusia Dmitry Medvedev. Di awal 1990an, pejabat Rusia menggambarkan negara-negara pecahan Soviet sebagai tetangga terdekat Rusia. Terminologi itu sekarang sudah tidak populer, tetapi dalam benak elit Rusia masih berpandangan bahwa negara-negara bekas Soviet di Eropa Timur dan Eurasia tidak berdaulat penuh dan Moskow tetap memiliki hak spesial atas negara-negara tersebut. Dengan mempertahankan pengaruh Rusia di negara-negara bekas Uni Soviet, membantu pemimpin Rusia mempertahankan *image* kebesaran Rusia. Di bawah Putin, Rusia berupaya untuk mengembangkan pengaruhnya dengan mendorong integrasi ekonomi dan politik dengan negara-negara post-Soviet, melalui pembentukan Uni bea cukai dengan Belarusia dan Kazakhstan. Rusia juga berupaya membentuk Uni Eurasia, blok supranasional baru yang diklaim Putin mengikuti model Uni Eropa yang akan diluncurkan pada tahun 2015, dimana Belarusia dan Kazakhstan telah menandatangani, sementara Armenia, Kyrgyzstan, dan Tajikistan telah menunjukkan ketertarikannya<sup>44</sup>.

Putin berupaya mengubah blok Eurasia menjadi blok alternatif kultural dan geopolitik

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

bagi Barat dan Putin menegaskan bahwa blok ini tidak akan berarti tanpa keikutsertaan Ukraina di dalamnya. Impian Eurasia ini – dimana prospek perjanjian kerja sama antara Ukraina dan Uni Eropa pada November 2013 menjadikan Ukraina tidak masuk dalam Uni Eurasia – menjadi perhatian besar Putin dan mendorongnya untuk memberikan konsesi kepada Presiden Viktor Yanukovich berupa jaminan pinjaman kepada Ukraina, dengan harapan Kiev menolak tawaran dari Brussel. Namun, perkembangan di Ukraina tidak sesuai dengan harapan Rusia. Tindakan Yanukovich menolak menandatangani perjanjian dengan Uni Eropa telah mengakibatkan protes yang berujung dengan digulingkannya Yanukovich dari kursi presiden. Ditambah lagi, pada 21 Maret 2014, pemerintahan sementara Ukraina akhirnya menandatangani perjanjian dengan Uni Eropa.

Meski Moskow memiliki berbagai cara yang dapat digunakan untuk meluaskan pengaruh regionalnya, seperti ekspor energi dan ikatan perdagangan, tetapi dukungan terhadap gerakan separatistis merupakan senjata kuat. Negara-negara yang bergantung pada perlindungan Rusia, seperti Abkhazia, Ossetia Selatan, Transnistria, dan sekarang Krimea, berperan sebagai wilayah untuk memproyeksikan pengaruh politik dan ekonomi Rusia. Moskow tidak membantu Nagorno-Karabakh secara langsung, namun membantu Armenia. Abkhazia, Ossetia Selatan, Transnistria mengizinkan Rusia untuk menempatkan pasukan di wilayah mereka, begitu pula dengan Armenia. Dalam hal ini, Abkhazia dan Ossetia Selatan menjadi tempat bernaung sekitar 3.500 pasukan Rusia, serta sekitar 1.500 personel *Federal Security Service*; Transnistria memiliki 1.500 tentara Rusia di wilayahnya; dan Armenia memiliki sekitar 5.000 pasukan Rusia. Salah satu alasan penting mengapa Moskow menganeksasi Krimea adalah nilai strategis semenanjung itu yang juga menjadi stasiun Armada Laut Hitam Rusia.<sup>45</sup>

### **Konsekuensi Lepasnya Krimea bagi Ukraina**

Bagi Ukraina, lepasnya Krimea menimbulkan beberapa konsekuensi, baik perubahan konstelasi

<sup>45</sup> *Ibid.*

politik internal, geopolitik, maupun ekonomi dalam bentuk hilangnya properti negara di semenanjung, termasuk sektor energi dan pertambangan serta infrastruktur pelabuhan yang signifikan bagi eksportir Ukraina. Selain itu, muncul pula permasalahan demarkasi. Secara *de facto*, perbatasan darat antara Ukraina dan Krimea berada di antara wilayah Republik Otonom Krimea dan wilayah Kherson Ukraina, sepanjang 20 km. Rusia kemungkinan akan berupaya mengambil alih sebagian wilayah Arabat Spit yang merupakan bagian dari wilayah Kherson untuk mengontrol stasiun kompresor pipa gas yang menyuplai Krimea. Negosiasi awal mengenai batas perairan di Laut Azov tidak lagi relevan mengingat titik awal pembagian wilayah perairan berubah secara fundamental. Yang penting dilakukan adalah menentukan demarkasi wilayah perairan dan batas benua di barat Krimea, dimana terdapat ikan, minyak, dan gas alam; dan untuk menentukan rute pelayaran ke pelabuhan Odessa, Belgorod, Nikolayev dan Kherson. Ukraina tidak mau menunda perundingan dalam persoalan ini karena jika hal itu dilakukan maka dapat diartikan sebagai pengakuan atas perubahan teritorial. Dalam hal ini, pemerintah Ukraina akan terus mempercepat demarkasi batas wilayah darat Ukraina/Rusia di luar Krimea, meski Moskow akan menghalangi upaya tersebut.<sup>46</sup>

Sementara itu, dari perspektif ekonomi, efek hilangnya Krimea bagi Ukraina hanya berpengaruh pada makro ekonomi dalam lingkup terbatas (Krimea menyumbangkan 3,6% bagi GDP Ukraina tahun 2013). Namun, hal ini akan mengakibatkan efek serius bagi sektor ekonomi tertentu yang disebabkan oleh pengambilalihan properti Ukraina yang terletak di semenanjung oleh pemerintahan Krimea. Hilangnya sektor energi lokal dan aset pertambangan merupakan harga mahal yang harus dibayar Ukraina, termasuk perusahaan Chomomornaftohaz. Perusahaan ini merupakan salah satu dari tiga perusahaan tambang negara yang dimiliki oleh NAK Naftogaz Ukraina dan salah satu perusahaan

<sup>46</sup> Tadeusz A. Olszanski, Agata Wierzbowska-Miazga, "The consequences of the Annexation of Crimea," <http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2014-03-19/consequences-annexation-crimea>, 19 Maret 2014, diakses pada tanggal 3 Oktober 2014.

yang memproduksi gas dalam waktu cepat di tahun 2014.<sup>47</sup> Namun demikian, kerugian Ukraina akibat lepasnya produksi Chomomornaftohaz tidak merubah keseimbangan gas Ukraina secara fundamental.

Lepasnya Krimea juga dikaitkan dengan berkurangnya zona ekonomi eksklusif Ukraina di Laut Hitam dan Laut Azov. Dalam prakteknya, hal ini meniadakan kesempatan bagi Ukraina untuk mengimplementasikan proyek ekstraksi hidrokarbon dari Laut Hitam yang telah direncanakan untuk dilakukan bersama dengan perusahaan Barat. Misalnya, di akhir 2013 Ukraina telah menandatangani perjanjian dengan ENI dan EdF untuk ekstraksi gas alam dari bays benua di Selat Kerch; dan pada 19 Maret 2013, perusahaan British Shell menarik diri dari negosiasi untuk penandatanganan kontrak dalam proyek ekstraksi hidrokarbon dari batas wilayah Skifski di Laut Hitam.<sup>48</sup>

Konsekuensi ekonomi yang signifikan lainnya adalah perubahan kepemilikan perusahaan swasta yang beroperasi di Krimea. Kemungkinan terbesar adalah ekspansi bisnis Rusia dalam skala besar yang tidak hanya berkaitan dengan otoritas lokal. Dalam konteks ini, terdapat ketidakpastian mengenai status aset Krimea di masa depan yang masih dimiliki kelompok bisnis besar Ukraina. Pengusaha Ukraina seperti Rinat Akhmetov, Dmytro Firtash dan Andriy Klyuyev masih memiliki bisnis di Krimea. Meskipun otoritas Krimea menegaskan bahwa mereka tidak akan mengambil alih bisnis swasta, tetapi dalam kasus energi lokal, terdapat tanda-tanda kemungkinan nasionalisasi seluruh fasilitas listrik. Ditambah lagi, banyak pengusaha Ukraina yang memiliki perumahan mewah di Krimea dan menyewakan pantai dengan luas ribuan hektar di wilayah pantai selatan Krimea.<sup>49</sup>

Dari perspektif politik domestik, konsekuensi lepasnya Krimea adalah bahwa persoalan tersebut akan menjadi tema utama dalam perdebatan politik Ukraina, termasuk dalam kampanye

<sup>47</sup> Pada 2013 perusahaan ini meningkatkan produksinya menjadi 1,65 billion cubic metres (bcm), dimana dalam jangka pendek dapat memenuhi kebutuhan gas di semenanjung, yang berkisar antara 1,7 dan 2 bcm.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

presiden dan pemilu parlemen. Sebelumnya, Krimea dan Sevastopol memiliki 13 kursi di parlemen Ukraina. Hilangnya kursi anggota parlemen dari Krimea dan Sevastopol akan memperlemah kubu pro-Rusia di parlemen. Namun, hilangnya sejumlah 13 kursi di parlemen tersebut tidak akan mengancam jumlah kuorum di parlemen. Jika perwakilan Krimea yang terpilih mengundurkan diri, maka hal ini tidak mempengaruhi fungsi parlemen, mengingat kursi mereka secara otomatis akan diisi oleh kandidat lainnya dari partai lain. Lebih lanjut, lepasnya Krimea akan mendorong perdebatan mengenai masa depan negara Ukraina. Status Krimea akan menjadi permasalahan dalam diskusi tentang konstitusi baru Ukraina, mengingat mustahil mempertahankan UU lama yang berkaitan dengan otonomi Krimea.<sup>50</sup>

### **Sikap Barat atas Kasus Krimea**

Setelah Krimea mendeklarasikan kemerdekaan dari Ukraina, Rusia langsung bergerak cepat. Presiden Rusia Vladimir Putin meminta parlemen untuk meratifikasi perjanjian pada 18 Maret 2014 untuk mengadopsi dua wilayah baru, Republik Krimea dan kota Sevastopol, ke dalam teritori Rusia. Dua hari kemudian, diadakan referendum di Krimea dimana 96,77% pemilih Rusia mendukung penggabungan Krimea dengan Rusia. Li Zhiguo, peneliti studi Rusia dari *China Institute of International Studies* (CIIS) mengungkapkan bahwa kepentingan Barat di Ukraina tidak secara serius menggelar perang. Namun bagi Rusia, Krimea sangat penting untuk direbut meski dengan resiko perang.<sup>51</sup>

Dalam konteks ini, negara-negara Eropa yang bergantung pada gas alam dari Rusia, tidak akan mengambil upaya ekstrim melawan Rusia. Dalam pidato pada 19 Maret 2014, Putin mengungkapkan bahwa dia akan menghormati keinginan rakyat Krimea, dengan menekankan bahwa keputusan Krimea sejalan dengan hukum internasional, khususnya Artikel 1 Piagam PBB yang menetapkan prinsip persamaan dan

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Ding Ying, "Compromising Over Crimea - Moscow's Absorption of Crimea may Trigger a New "cool war" between Russia and the West", *Beijing Review*, 27 Maret 2014.

penentuan nasib sendiri (*self-determination*).<sup>52</sup> Namun demikian, Li Zhiguo mengungkapkan bahwa situasi akan berbeda jika Barat berhenti menekan Rusia setelah Presiden Ukraina terguling, Viktor Yanukovich, mengumumkan diadakannya pemilu presiden lebih dini sebagai salah satu cara mengakhiri krisis politik pada 21 Februari 2014.<sup>53</sup>

Sementara itu, kekuatan politik di wilayah barat Ukraina berniat untuk membersihkan kekuatan pro-Rusia yang ada di wilayah timur Ukraina, dan meningkatkan krisis politik di Kiev yang membuat marah Rusia. Saat ini Putin ingin memberikan pelajaran kepada Barat yang telah mendukung “Revolusi Oranye” di Ukraina pada 2004.<sup>54</sup> Dalam pidatonya, Putin terus menyerang sikap hipokrit dan standar ganda yang dijalankan AS. Dengan direbutnya Krimea yang dianggap Rusia sebagai “wilayahnya yang hilang”, reputasi personal Putin sebagai pemimpin kuat dan tangguh semakin tinggi.

Dalam hubungan antara Barat dan Rusia, diprediksikan akan memasuki tahap “*cool war*”, dimana pertentangan kedua pihak lebih lemah ketimbang masa *Cold War*. Jika semua pihak tetap berkomitmen untuk mendapat solusi politik, masih ada harapan bagi stabilitas regional. Sementara itu, komunitas internasional khawatir bahwa referendum di Semenanjung Krimea akan memicu efek domino di timur Ukraina, dimana kota-kota yang pro-Rusia (Donetsk dan Luhansk) akan mengikuti jejak Krimea dan mencoba bergabung dengan Rusia.<sup>55</sup>

Kekhawatiran dunia internasional akan efek domino masih terbuka, dengan melihat hasil pemilu presiden Ukraina yang diadakan pada 25 Mei 2014 lalu. Dalam pemilu tersebut, keluar sebagai pemenang adalah Petro Poroshenko,

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Revolusi Oranye adalah serangkaian protes dan peristiwa politik yang terjadi di Ukraina pada akhir November 2004 hingga Januari 2005, setelah pemungutan suara dalam pemilu presiden Ukraina 2004 yang dipandang diwarnai oleh korupsi, intimidasi terhadap pemilih. Revolusi ini sebagai respon terhadap terjadinya kecurangan pemilu dengan tuntutan konkrit untuk menolak hasil pemilu dan menuntut dilakukannya pemilu ulang dengan pengawas independen.

<sup>55</sup> Ding Ying, *op.cit.*

seorang pebisnis dengan pengalaman panjang dalam pemerintahan, yang jauh mengungguli mantan PM Yulia Tymoshenko. Poroshenko yang pro-Barat menjanjikan ikatan ekonomi dan politik yang lebih erat dengan negara-negara Barat. Namun, mengingat Rusia menyuplai sebagian besar kebutuhan gas alam dan menjadi pasar terbesar Ukraina, maka Presiden Ukraina yang baru terpilih harus pula memperbaiki hubungan dengan Rusia.

Dalam konteks wilayah timur Ukraina yang ingin mengikuti jejak Krimea, jika wilayah timur Ukraina dapat berbagi dalam proses politik Ukraina pasca pemilu, dimana Rusia masih memiliki suara dalam urusan domestik Ukraina, maka Rusia tidak akan mengintervensi lebih jauh dalam urusan politik domestik Ukraina. Namun, jika kekuatan pro-Rusia tidak dilibatkan dalam pemilu, maka Moskow akan terus mendukung keinginan wilayah timur Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. Mengingat Barat tidak memiliki banyak kepentingan di Ukraina, maka kecil kemungkinan terjadi konflik militer di Ukraina dalam kasus Krimea. Apalagi tanpa bantuan Barat, Ukraina tidak memiliki kemampuan untuk mengkonfrontir kekuatan besar seperti Rusia.

Sebagai reaksi atas krisis Krimea, Presiden AS Barack Obama mengungkapkan bahwa AS tidak akan mengambil tindakan militer di Ukraina melawan Rusia. Obama juga menegaskan bahwa AS mendorong hubungan terbuka antara Ukraina, Rusia, dan Barat. Pada 5 Maret 2014, Obama menegaskan bahwa masih terbuka ruang bagi Ukraina untuk menjadi kawan bagi Barat maupun Rusia. Obama juga mengingatkan Rusia untuk tidak ikut campur dalam urusan domestik Ukraina, meski mengakui bahwa Rusia memiliki kepentingan yang “legitimate” di negara tersebut.<sup>56</sup>

## Penutup

Untuk meredakan krisis di Krimea, pada 17 April 2014, ditandatangani perjanjian antara Rusia, Ukraina, AS, dan Uni Eropa di Jenewa. Perjanjian ini tampaknya tidak akan sepenuhnya mengakhiri konflik di Ukraina, tetapi setidaknya

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

menunjukkan bahwa Kremlin dan White House berupaya menghindari memburuknya situasi regional. Perjanjian ini menuntut semua pihak untuk menghindari penggunaan kekerasan, intimidasi atau aksi provokasi. Di samping itu, perjanjian ini memberikan amnesti kepada pemrotes yang menguasai gedung-gedung pemerintah dan menyerahkan senjata mereka. Pemerintah Ukraina menyetujui untuk melakukan amandemen konstitusi dan melindungi hak-hak minoritas serta melakukan dialog nasional setelah pemilu presiden 25 Mei 2014. Namun sayangnya, perjanjian ini tidak menjelaskan perlucutan senjata dan amandemen konstitusi secara lebih detail.<sup>57</sup>

Dibalik kelemahannya, perjanjian ini merefleksikan kesamaan tujuan masing-masing pihak untuk menormalkan kembali situasi. Dalam hal ini, Putin menyadari bahwa Barat tidak akan menolerir separasi selanjutnya di Ukraina karena akan mengeliminir “*buffer zone*” antara Rusia dan Eropa. Sementara itu, secara politik dan diplomatik, AS dan Uni Eropa tidak akan mengeluarkan keputusan PBB dengan efek hukum, mengingat Rusia memiliki hak veto permanen sebagai anggota Dewan Keamanan PBB.

## Daftar Pustaka

### Buku

Sasse, Gwendolyn. 2007. *The Crimea Question: Identity, Transition and Conflict*. Cambridge: Harvard University Press.

### Jurnal

Ryabchuk, Anastasiya. 2014. “Right Revolution? Hopes and Perils of the Euromaidan Protests in Ukraine”. *Debatte: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe*.

Korostelina, Carina. 2013. “The Multiethnic State-building Dilemma: National and Ethnic Minorities’ Identities in the Crimea”, *National Identities* 5(2).

Mizrokhi, Elena. 2009. “Russian ‘separatism’ in Crimea and NATO: Ukraine’s Big Hope, Rus-

sia’s Grand Gamble”. *Chaire de recherche du Canada*.

Marples, David R. & David F. Duke. 1995. “Ukraine, Russia, and the Question of Crimea”, *Nationalities Papers* 23(2).

Mankoff, Jeffrey 2014. “Russia’s Latest Land Grab: How Putin Won Crimea and Lost Ukraine”. *Foreign Affairs* 93(3).

### Surat Kabar dan Website

*VoA News*. “Crimea Applies to Join Russia”. 17 Maret 2014 <http://www.voanews.com/content/voting-under-way-in-Crimea-referendum-to-join-russia/1872380.html>.

Olszanski Tadeusz A., Agata Wierzbowska-Miazga. “The consequences of the Annexation of Crimea”. 19 Maret 2014. <http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2014-03-19/consequences-annexation-Crimea>.

*Liputan6*. “Petro Poroshenko Umumkan Kemenangan pada Pilpres Ukraina”. 26 Mei 2014. <http://m.liputan6.com/news/read/2054588/petro-poroshenko-umumkan-kemenangan-pada-pilpres-ukraina>.

Watson, Ivan & Maxim Tkachenko. “Rusia, Ukraine Agree on Naval Base-for-Gas Deal”. 21 April 2010. <http://edition.cnn.com/2010/WORLD/europe/04/21/russia.ukraine/index.html?hpt=T2>.

Ying, Ding. 27 Maret 2014. “Compromising Over Crimea - Moscow’s Absorption of Crimea May Trigger a New “cool war” between Russia and the West”. *Beijing Review*.

-----, 1 Mei 2014. “A Fragile Foursome - The Ukrainian Crisis will Persist, but a Recent Four-Way Agreement May Not”. *Beijing Review*.

<sup>57</sup> Ding Ying, “A Fragile Foursome - The Ukrainian Crisis will Persist, but a Recent Four-Way Agreement May Not”, *Beijing Review*, 1 Mei 2014.